

CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KECAMATAN ABIANSEMAL, BADUNG, BALI

I Dewa Ayu Putu Inten Praningsih

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
e-mail: @dewaayuinten09@gmail.com

I Gede Cahyadi Putra

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
e-mail: @cahy4dini@gmail.com

I Ketut Sunarwijaya

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstrak

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. *Corporate governance* perlu diterapkan oleh LPD karena dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik LPD dan pengelola LPD, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 LPD dengan 168 responden. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu *purposive sampling* dan *proportionate random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Kata kunci: *Corporate governance*, kinerja, Lembaga Perkreditan Desa

Abstract

Corporate governance that explains the relationship between all interested parties in a regulated and organized business. Corporate governance needs to be implemented by the LPD because it can reduce agency conflicts between LPD owners and LPD managers, so as to improve LPD performance. This study aims to analyze the effect of corporate governance on LPD performance in Abiansemal District. The number of samples used in this study were 34 LPD with 168 respondents. Sampling is done in two stages, namely purposive sampling and proportionate random sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and previously tested research instruments. The results showed that corporate governance which includes transparency, accountability, responsibility, independence and fairness had a positive effect on the performance of the Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in Abiansemal District.

Keywords: Corporate governance, performance, Lembaga Perkreditan Desa

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali, proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan

Desa Pakraman. Maksud didirikannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah membantu masyarakat di daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ada di bawah desa adat setempat sebagai pengawas serta dibantu oleh seorang ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat dilengkapi dengan sejumlah kepala seksi dan karyawan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setempat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikelola secara terpisah dengan *krama* desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Menurut Shill (2008:22), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan lebar perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Untuk memperkecil munculnya konflik keagenan maka diperlukan pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan *principal* dan juga dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Zarkasyi (2008:38-41) mengemukakan lima dasar prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Di Kecamatan Abiansemal terdapat 34 Lembaga Perkreditan Desa (LPD), di tahun 2018 tiga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal dinyatakan kurang sehat dan satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dinyatakan tidak sehat. Salah satu penyebab Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak sehat atau kurang sehat karena masih lemahnya sumber daya manusia (SDM), kredit macet dan pengurus yang meminjam uang namun tidak mengembalikan kredit dan menggunakan uang nasabah untuk keperluan pribadi.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Kecamatan Abiansemal merupakan wilayah pembangunan yang memberikan dampak perubahan baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi yang dianggap memiliki prospek untuk maju. Untuk mengantisipasi adanya hal yang bersifat negatif akibat proses pembangunan maka diperlukan adanya perangkat dan kelembagaan yang mampu membantu masyarakat setempat dan diharapkan menjadi modal untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *corporate governance* sangat diperlukan di dalam lembaga tersebut agar dapat meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan-permasalahan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten antara pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976:308) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu

menjelaskan spesifikasi-spesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dengan investor.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu atau prinsipal mendelegasi pekerjaan kepada pihak lain atau agen yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut, karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem*.

Menurut Messier *et al.* (2006:7), hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: (1) terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum lebih memiliki informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik dan (2) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Corporate governance adalah salah satu upaya untuk menjembatani konflik tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk membuat *corporate governance* berfungsi dengan baik, terdapat empat kelompok yang harus saling berinteraksi yaitu tersedianya undang-undang atau jaminan hukum yang kuat, ditegakkannya *accountability*, adanya fungsi direksi dan manajer yang membantu direksi (Sutedi, 2011: 29).

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Zarkasyi (2008:38) menyatakan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi inilah yang diharapkan dapat menjadikan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi lebih baik. Semakin baik prinsip transparansi diterapkan, maka meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian sebelumnya pada tahun 2018 oleh Andreana dan Wirajaya menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Salah satu prasyarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholders* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Zarkasyi, 2008:39). Semakin baik prinsip akuntabilitas diterapkan, maka semakin meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017 oleh Mahaendrayasa dan Dwijaputri menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal.

Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Zarkasyi (2008:40) menyatakan responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 oleh Suryani menyatakan responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3: Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Menurut Iman dan Amin (2012:8), independensi adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Menurut Zarkasyi (2008:40) untuk melancarkan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif dan perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam masalah dengan begitu aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 oleh Sandraningsih dan Dwijaputri menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4: Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Menurut Daniri (2005:12), secara sederhana kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas maupun asing. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Zarkasyi, 2008:41). Semakin baik prinsip kewajaran ini diterapkan, maka semakin meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 oleh Paramita menyatakan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5:Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Objek penelitian ini adalah prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Abiansemal.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1) Kinerja LPD

Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja LPD diukur dengan 9 pertanyaan mengenai penataan ruang pelayanan, tempat parkir yang memadai, ketersediaan brosur informasi, penataan dokumen, penampilan pegawai, ketepatan dan kecepatan pelayanan, laporan keuangan disajikan tepat waktu, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen dan terjadinya efisiensi biaya di LPD.

2) Transparansi

Transparansi adalah sikap keterbukaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga. Transparansi diukur dengan 4 pertanyaan mengenai jumlah badan pengawas, pertemuan dalam membahas LPD, ketersediaan laporan keuangan dan pencatatan laporan keuangan berdasarkan PABU.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Akuntabilitas diukur dengan 4 pertanyaan mengenai pemahaman visi, misi, tujuan dan target operasional, pemahaman peran, tugas dan tanggung jawab pengurus LPD, pendokumentasian laporan keuangan dan bukti transaksi dan terbentuknya sistem pengendalian internal.

4) Responsibilitas

Responsibilitas adalah pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diukur dengan 4 pertanyaan mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kepedulian terhadap lingkungan, pengambilan keputusan sesuai sistem yang ditetapkan dan penerapan standar profesional etika.

5) Independensi

Independensi adalah pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mengambil keputusan bebas dari intimidasi dari pihak lain sehingga terhindar dari pihak yang merugikan. Independensi diukur dengan 4 pertanyaan mengenai keputusan yang objektif, ketua menghindari dominasi oleh pihak manapun, penggunaan tenaga ahli disetiap divisi dan kebijakan intern sesuai dengan peraturan.

6) Kewajaran

Kewajaran adalah perlakuan yang adil dan setara untuk semua kalangan sesuai dengan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran diukur dengan 4 pertanyaan mengenai kesempatan berpendapat, keadilan terhadap anggota, kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karyawan terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan LPD.

Variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang dituangkan dalam kuesioner. Responden diminta memberikan tanda centang di sebelah masing-masing pernyataan yang disediakan yaitu: Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS), Skor 2: Tidak Setuju (TS), Skor 3: Ragu-Ragu/Netral (RR/N), Skor 4: Setuju (S), Skor 5: Sangat Setuju (SS).

Populasi yang diteliti adalah semua karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansema berjumlah 308 orang dan 115.801 nasabah. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:

1) *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tahap ini untuk menentukan responden ketua dan badan pengawas LPD. Responden yang dipilih adalah 68 orang yang terdiri dari 34 orang ketua dan 34 orang badan pengawas dari masing-masing Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansema.

2) *Proportionate random sampling* yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Tahap ini untuk menentukan responden dari nasabah LPD dengan menggunakan rumus Slovin. Responden yang dipilih adalah 100 orang nasabah dari LPD di Kecamatan Abiansema.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen, analisis deskriptif frekuensi, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji kelayakan model.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen

Pengujian validitas tiap butir kuesioner digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Apabila korelasi

skor faktor dengan skor total positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat dan dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2016:140). Hasil validitas instrumen akan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
KNJ1	0,612	0,000	Valid
KNJ2	0,623	0,000	Valid
KNJ3	0,711	0,000	Valid
KNJ4	0,302	0,000	Valid
KNJ5	0,623	0,000	Valid
KNJ6	0,711	0,000	Valid
KNJ7	0,330	0,000	Valid
KNJ8	0,623	0,000	Valid
KNJ9	0,720	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2019

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Independen

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
Transparansi (TR)			
TR1	0,521	0,000	Valid
TR2	0,550	0,000	Valid
TR3	0,599	0,000	Valid
TR4	0,568	0,000	Valid
Akuntabilitas (AC)			
AC1	0,663	0,000	Valid
AC2	0,743	0,000	Valid
AC3	0,663	0,000	Valid
AC4	0,743	0,000	Valid
Responsibilitas (RP)			
RP1	0,486	0,000	Valid
RP2	0,673	0,000	Valid
RP3	0,717	0,000	Valid
RP4	0,718,000	0,000	Valid
Independensi (IND)			
IND1	0,798	0,000	Valid
IND2	0,863	0,000	Valid

IND3	0,815	0,000	Valid
IND4	0,863	0,000	Valid
Kewajaran (FS)			
FS1	0,538	0,000	Valid
FS2	0,851	0,000	Valid
FS3	0,573	0,000	Valid
FS4	0,852	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid.

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha (α)*. Ghozali (2016:48) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7. Hasil uji reliabilitas instrumen akan disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
TR	0,756	Reliabel
AC	0,728	Reliabel
RP	0,715	Reliabel
IND	0,854	Reliabel
FS	0,769	Reliabel
KNJ	0,776	Reliabel

Sumber: Data diolah 2019

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa seluruh data yang digunakan pada kuesioner dikatakan reliabel.

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Penelitian

Variabel	Koefisien Regresi	t-value	Sig
Constant	2,612	0,959	0,339

TR	0,550	8,331	0,000
AC	0,522	5,261	0,000
RP	0,607	9,451	0,000
IND	0,584	14,878	0,000
FS	0,262	5,667	0,000
Adj R ²	0,729		
F-value	90,808		
Sig	0,000		

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KNJ = 2,612 + 0,550TR + 0,522AC + 0,607RP + 0,584IND + 0,262FS$$

Keterangan:

- KNJ : kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
 TR : keterbukaan/*transparency*
 AC : akuntabilitas/*accountability*
 RP : pertanggung jawaban/*responsibility*
 IND : kemandirian/*independency*
 FS : kewajaran/*fairness*

Hasil uji t pada Tabel 4 menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,729 atau 72,9% yang berarti pengaruh *corporate governane* terhadap kinerja LPD adalah sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan nilai F-hitung sebesar 90,808 dengan nilai sigifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan *corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Maka model regresi linear berganda fit dengan data observasi sehingga layak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal. Transparansi yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada *stakeholders*. LPD yang semakin transparansi dalam mengungkapkan informasinya akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap LPD tersebut, karena mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber daya merupakan salah satu hak dari *stakeholder* sehingga secara tidak langsung LPD akan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk menambah nilai LPD. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Hindistari dan Dwijaputri yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Putra, dkk yang menyatakan transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Putri dan Putra yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen LPD. Salah satu prasyarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholders* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja LPD. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dikatakan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada Mahaendrayasa dan Dwijaputri yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan tahun 2017 oleh Heski, dkk yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Puspa dan Yulinda yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal. Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal LPD serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip responsibilitas pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan dan peraturan LPD yang berlaku sudah berjalan dengan baik. Peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, proses pengambilan keputusan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta kesesuaian dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan standar profesional etika diterapkan dalam LPD secara konsisten dan diberikan sanksi kepada yang melanggar dapat meningkatkan kinerja LPD. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sawitri dan Ramantha yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan tahun 2018 oleh Luwih dan Muliarta yang menyatakan responsibilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan tahun 2017 oleh Putri dan Putra yang menyatakan responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip independensi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak), LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak

manapun, penggunaan tenaga ahli disetiap divisi atau bagian dalam LPD, kebijakan intern LPD dijalankan dengan peraturan hukum yang berlaku maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja LPD. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Wirawan dan Dwijaputri yang menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Sari yang menyatakan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal. Kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola usahanya LPD selalu berlandaskan kewajaran dan kesetaraan, maka kinerja LPD juga akan meningkat. Sebagaimana seharusnya lembaga baik bank maupun non bank dengan menjalankan aktivitas manajemennya dengan menerapkan prinsip kewajaran maka nantinya akan mengarah pada baiknya kinerja yang dihasilkan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sawitri dan Ramantha yang menyatakan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Hati dan Arumrasmy yang menyatakan kewajaran berpengaruh negatif terhadap kinerja. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Luwih dan Muliarta yang menyatakan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal.

Penelitian ini menggunakan 34 LPD dengan melibatkan ketua, badan pengawas dan nasabah sebagai responden. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian seperti seluruh LPD di Provinsi Bali. Penelitian ini belum memperhitungkan faktor-faktor lain diluar prinsip-prinsip *corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja LPD, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian faktor atau proksi lain, seperti mekanisme pemantauan *corporate governance* sehingga penelitian dapat digeneralisasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Daniri. 2005. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia.
- Dwijaputri, I Gusti Ayu Made Asri. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat. E-Jurnal Akuntansi Unud, Vol.12., No.1.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). Jakarta.

- Ghozali, H Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jensen, M.C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3, 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Indonesia: KNKG.
- Mahaendrayasa, Putu Krishna Aryastha. 2017. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan LPD di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Unud*, Vol.12., No.2, pp.970-995.
- Messier, William F.Jr dan Steven M. Glover dan Douglas F. Prawitt. 2006. *Auditing and Assurance Service A Sistematic Approach*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oliver Hart. 1995. Corporate Governance: Some Theory and Implications. *The Ekonomic Journal*, 105(430), pp: 678-689.
- Paramita, Kadek Rudi. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja The Atanaya Hotel Bali. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 44 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Sandraningsih, Ni Kadek Budi. 2016. Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Sanim, Bunasor. 2011. *The Golden Triangle of Control System in PT Bank Rakyat Indonesia*, Tbk. Bogor : IPB Press.
- Sari, Dek Ayu Meia Kartika. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Badung Utara. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Setyawan, Komang Meitradi. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa
- Suryani, Ni Putu Ayu Raka. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal dan Petang. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Suryantara, I Wayan. 2018. Pengaruh Prinsip GCG dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap Kinerja Keuangan LPD. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shill, N. C. 2008. Accounting for Good Corporate Governance. *JOAAG*. 3(1), pp:22-31
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal. 2012. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo.
- Zarkasyi, Mohammad Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.